

REFLEKSI 71 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA: KEBHINEKAAN DAN DEMOKRASI

Mardawani

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Jl. Pertamina-Sengkuang-Sintang

Email: mardawani113@yahoo.co.id

Abstract

This article was written for the author's concern about the phenomenon that is prevalent in Indonesia today which seems to want a shift from the goal of an appropriate independent state. The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), was faced with several events which showed an attitude of intolerance towards diversity. The influx of outside influences and the increasingly rapid flow of globalization, have a positive and negative impact on Indonesian life. The use of social media causes the flow of information to spread even unstoppable. 71 years of independence, it is not necessarily accompanied by the maturity of the people in democracy. Democracy that guarantees the participation and freedom of the people contains elements that in the government there is interference from the people, majority government, minority protection, individual freedom, freedom guaranteed by law, participation in conceptual formulation and practice. In its implementation, as a country full of differences, it is necessary to have a full understanding of the concept and purpose of an independent Indonesian state. Reflection on the 71 years of Indonesian independence, it turns out that the Indonesian people are still unable to consistently carry out the motto of Bhineka Tunggal Ika. We cannot achieve it if the struggle is only interpreted as the responsibility of a group of people. It is important that there is unity and unity in diversity in realizing the Unitary Republic of Indonesia. The Indonesian people must remain vigilant about their country's resilience, so that they are not divided in maintaining their identity as a diverse culture.

Keywords: diversity, democracy

Abstrak

Artikel ini ditulis atas keprihatinan penulis terhadap fenomena yang marak terjadi di Indonesia saat ini yang seolah-olah menginginkan suatu pergeseran dari tujuan negara merdeka yang semestinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dihadapkan pada beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap intoleransi terhadap kebhinekaan. Masuknya pengaruh dari luar dan semakin pesatnya arus globalisasi, membawa dampak yang positif maupun negatif bagi kehidupan bernegara Indonesia. Penggunaan media sosial menyebabkan arus informasi menyebar bahkan tak terbendung. 71 tahun usia kemerdekaan, tidak serta merta diiringi kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Demokrasi yang menjamin partisipasi dan kebebasan rakyat mengandung unsur bahwa didalam pemerintahan terdapat campur tangan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kebebasan individual, kemerdekaan yang dijamin Undang-undang, partisipasi dalam perumusan konseptual maupun praktik. Dalam pelaksanaannya, sebagai sebuah negara yang penuh dengan perbedaan tentu diperlukan pemahaman yang utuh tentang konsep dan tujuan negara Indonesia merdeka. Refleksi terhadap 71 tahun kemerdekaan Indonesia ternyata Bangsa Indonesia masih belum mampu secara konsisten melaksanakan semboyan hidup Bhineka Tunggal Ika. Kita tidak mungkin dapat mencapainya jika perjuangan hanya dimaknai sebagai tanggung jawab sekelompok orang. Penting ada persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam mewujudkan NKRI. Bangsa Indonesia harus tetap mewaspadaai ketahanan negerinya, agar tidak terpecah-belah dalam menjaga jati dirinya sebagai suatu bangsa yang beragam budaya.

Kata kunci: Kebhinekaan, Demokrasi

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia lahir dari suatu proses sejarah perjuangan yang panjang, kemudian menegara sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa membawa konsekuensi logis pada pergaulan antarbangsa yang sekaligus menghendaki pelibatan diri ke dalam pembangunan tata kehidupan dunia yang harmonis menuju kesejahteraan umat manusia. Proses mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai usia ke-71 tahun telah 3 (tiga) kali pergantian rezim, yakni rezim orde lama, rezim orde baru dan rezim reformasi. Dari ketiga rezim tersebut memiliki ciri dan pola tersendiri dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pada rezim orde lama, sistem pemerintahan parlementer setelah proklamasi kemerdekaan, pelaksanaan pemerintahan yang cenderung masih dipengaruhi oleh pemerintahan masa penjajahan pola pemerintahan tentu tidak berjalan secara demokratis. Pada rezim orde baru, sistem pemerintahan adalah presidensial yakni presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan, pada masa ini mulai ada peran rakyat dalam pemerintahan, yakni mulai berlakunya sistem pemilihan wakil rakyat yang akan memilih presiden. Sedangkan pada rezim reformasi mulai ada jaminan hak-hak secara bebas melalui berbagai lini kehidupan dengan munculnya pemerintahan yang demokratis. Masa ini mulai memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kehidupan berdemokrasi Indonesia. Jaminan akan pelaksanaan demokrasi bahkan diatur lewat UUD 1945 hasil amandemen.

Sekarang 18 tahun pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ternyata belum dapat terlaksana secara utuh, hal ini disebabkan oleh belum dewasanya kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam perbedaan yang ditandai oleh keberadaan lebih dari 200 etnis dan suku bangsa, sekitar 400 bahasa, serta bermacam agama yang dianut oleh rakyatnya merupakan faktor yang melahirkan perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan setiap kelompok masyarakat, Perbedaan kepentingan dan tujuan

tersebut dapat diperkuat oleh faktor ruang hidup berupa pulau-pulau yang secara geografis terpisah satu dari yang lain. Demokrasi dalam bangsa Indonesia yang majemuk, beragam sosial, etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain sebagainya, sehingga bangsa Indonesia sering disebut sebagai bangsa multikultural memang merupakan tantangan tersendiri. Pada pihak lain, realitas "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebhinekatunggalikaan yang dapat menjadi *"integrating force"* yang dapat mengikat seluruh keragaman etnis, budaya, dan agama".

Demokrasi menisyaratkan bahwa terdapat peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Peran serta masyarakat dalam arti luas adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kehidupan yang cenderung bebas. Sejak hadirnya era reformasi demokrasi memberikan ruang kebebasan dalam bagi masyarakat dalam segala bidang. Kebebasan bukan merupakan keleluasaan untuk melakukan segala hal tanpa batas tetapi kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat

pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk perilaku rakyat yang berdaulat.

B. Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berbeda. Perbedaan ini sesungguhnya sudah disadari keberadaannya jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Bahkan para pendiri bangsa telah sepakat bahwa perbedaan adalah modal dasar dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia perbedaan itulah yang menjadi kekuatan yang mempersatukan (Bhineka Tunggal Ika). Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" artinya berbeda-beda tapi tetapi satu tujuan. Jadi, meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang, pemikiran, prinsip, serta karakter yang berbeda, tapi masyarakat Indonesia ini tetap memiliki satu tujuan yang sama yaitu menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur

Namun disisi lain, perbedaan sering menjadi ancaman serius bagi

bangsa Indonesia yang dengan kemajemukannya cenderung menyebabkan masyarakat mudah terpecahbelah apabila tidak mampu memahami secara utuh hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang sesungguhnya. Pemahaman yang utuh tentu harus ditopang oleh beberapa hal, diantaranya niat bersatu, tekad dan anutan nilai-nilai dasar ke-Indonesiaan yang melekat pada setiap individu masyarakat bangsa Indonesia. Jika nilai itu tak mampu dipertahankan maka sulit bagi bangsa yang majemuk ini untuk tetap bersatu ditengah arus globalisasi dan demokratisasi yang semakin memuncak.

Jika bangsa Indonesia ingin kemerdekaan yang sesungguhnya, tentu memerlukan tekad bersama dalam berjuang tanpa lagi terbatas pada sekat-sekat perbedaan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Justru perbedaan-perbedaan yang ada tersebutlah yang menjadi kekuatan dasar dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Jika kita melihat kembali kepada tujuan semua bangsa Indonesia memproklamasikan

kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana yang termuat dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia yang: Merdeka, Berdaulat, Bersatu adil dan makmur, 71 tahun usia kemerdekaan Indonesia bangsa Indonesia masih belum mewujudkan sepenuhnya tujuan tersebut. Merdeka memang sudah diproklamasikan namun belum seutuhnya, tersirat dari makna proklamasi yang menyatakan bahwa “...kemerdekaan telah mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia...” Namun untuk benar-benar masuk kedalam alam kemerdekaan itu sendiri memerlukan perjuangan yang panjang.

Dalam bangsa yang penuh dengan dinamika dan keberagaman, Indonesia tidak mungkin maju jika larut dalam perdebatan akan perbedaan atau memaksakan kehendak bahwa bangsa ini satu suku, satu agama, satu kebudayaan atau satu ras. Bangsa Indonesia yang dari sebelum lahir memang berbeda, tidak mungkin disatukan. Kita harus menyadari bahwa pembangunan dalam mengisi kemerdekaan tidak akan pernah tercapai tanpa

kebersamaan. Mustahil jika ada pihak yang menginginkan bangsa Indonesia hanya terdiri dari satu unsur agama, suku, budaya dan lain sebagainya.

C. Demokrasi Indonesia

Demokrasi sebagai suatu istilah disebut sebagai *government by the people* (Price, 2007), yang dapat diartikan sebagai pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan. Demokrasi sebagai salah satu istilah yang dipakai dalam politik. Sumantri (2003), mengartikan politik sebagai segala urusan yang berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks praktis, demokrasi cenderung memberikan ruang kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tidak terlepas dari suatu budaya yang menjadi anutan. Budaya demokrasi adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai nilai dasar demokrasi dan yang sudah

seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem politik demokrasi. Sedangkan inti dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi.

Pada budaya demokrasi mengandung makna antara lain yaitu kebebasan, kebersamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, menghormati penalaran dan keadaban. Kebebasan dalam hal ini bukan merupakan keleluasaan untuk melakukan segala hal tanpa batas tetapi kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kesadaran sendiri, karena nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk perilaku rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi memandang bahwa perbedaan itu pada hakekatnya menunjukkan setiap orang sama sederajat. Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lainnya. Persamaan dalam satu tujuan sebagai sebuah negara yang berdaulat adalah

kita sebagai manusia harus mampu menghargai harkat dan martabat sesama manusia.

Solidaritas sesama adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini manusia sama sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama diatas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Toleransi adalah sikap dimana kita sebagai manusia hendaknya toleran yang berarti bahwa kita harus menghargai pendapat, kepercayaan, pandangan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Kerena setiap orang memiliki hal tersebut yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragaman. Sikap toleran sangat menentukan pada sistem kebebasan yang bertanggung jawab.

Kejujuran merupakan kesanggupan untuk menyatakan kebenaran. Kejujuran diperlukan

agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik tanpa menimbulkan bibit-bibit yang mendatangkan konflik. Sebagai nilai penghormatan kejujuran akan menubuhkan integritas diri, disiplin, dan kesetiaan pada aturan aturan, sikap ini diperlukan dalam memelihara pemerintahan demokratis.

Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, menuntut hal serupa pada orang lain, kebiasaan untuk eberikan penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan untuk mencapai tujuan. Sebagai nilai penalaran dapat mendorong tumbuhnya ketebukaan pemikiran sosial dan politik.

Kedaban adalah tingginya tingkat kecerdasan lahir batin. Prilaku yang beradab adalah prilaku yang mencerminkan perhormatan dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana tercermin dalam sopan santun dalam bertindak. Oleh sebab itu keadaban ini dijadikan pedoman dala berprilaku sebagai warga negara yang

demokrasi dan santun. Berdasar pada nilai nilai ini masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya.

Nilai nilai tersebut keudian dijabarkan dalam kehidupan politik seperti nilai nilai yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo, nilai nilai tersebut seperti: 1). Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. 2). Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. 3). Mentelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan periodik. 4). Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum. 5). Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman. 6). Menjamin tegaknya keadilan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah tiga kali berganti rezim, yakni rezim orde lama, rezim orde baru dan rezim reformasi. Pada rezim orde lama menganut dua sistem demokrasi yakni parlementer (Konstitusi RIS) dan demokrasi terpimpin (UUD S 1950). Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini adalah sebagai berikut : Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab pada DPR. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dala kinerjanya kurang baik. Jika kabinet bubar maka presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang baru. Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilu.

Kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer antara lain yaitu : rata rata kabinet berusia pendek (terjadi krisis kabinet) sehingga program jangka panjang tidak terlaksana., terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam tubuh ABRI sebgan condong kepada kabinet Wilopo dan sebagian lagi condong kepada presiden, terjadi perdebatan antara Soekarno dengan tokoh masyumi masalah penggantin Pancasila,

Kelebihan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer. Badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya, DPR dapat berfungsi dengan baik, Pers bebas sehingga banyak variasi isi media massa, Pemerintah berhasil mengatasi pemberontak, sedikit sekali terjadi ketegangan diantara umat beragama, dan minoritas cina mendapat perlindungan dari pemerintah.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan presiden. Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. pada masa pelaksanaan demokrasi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ternyata banyak penyelewengan. Penyelewengan itu tampak pada hal hal berikut ini : 1). Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, presiden kadang kala mencampuri urusan kehakiman, 2). Pengekangan hak hak asasi warga negara di bidang politik dalam hal berserikat dan berkumpul, bahkan

dalam bidang pers juga ada pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran. Pelampauan batas wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi dari kewenangannya, 3). Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional, adalah lembaga diluar dari lembaga pemerintahan tetapi kedudukannya sama dengan lembaga pemerintah. Pengutamaan fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi dalam pemerintahan yang kadang kala melebihi dari batas kewenangannya.

Demokrasi Masa Orde Baru kehidupan politik pada masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini : 1). Pembatasan hak politik rakyat, jumlah partai politik dibatasi menjadi 3 parpol, 2). Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, walaupun secara formal kekuasaan dibagi bagi tetapi dalam prakteknya kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden. Pemilu yang tidak demokratis aparat pemerintahan dan keamanan berusaha

melakukan kecurangan agar golkar menang pemilu, 3). Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa.

Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan yang mengarah lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa dilihat dari sistem pemerintahannya, pemilunya, dan mekanisme dalam pemilu juga lebih baik lagi. Hak pilih umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara dewasa tanpa diskriminasi. Kesetaraan bobot suara antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen. Tersedianya pilihan yang signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih dari satu. Kebebasan nominasi rakyat bebas menominasikan wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu. Persamaan hak kampanye, masing-masing partai peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam kampanye hal itu bisa dilihat semua parpol memperoleh jatah yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kebebasan dalam memberikan suara,

dalam hal ini rakyat memperoleh jaminan kebebasan untuk memilih wakilnya tanpa ada paksaan dan ancaman. Kejujuran dalam penghitungan suara. Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik.

D. Penutup

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat Internasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme kebangsaan yang kokoh, demi tercapainya ketahanan negara dari pihak luar. Selain hal tersebut, bangsa Indonesia harus tetap mewaspadaikan ketahanan negerinya dari pihak dalam, agar tidak terpecah-belah dalam menjaga jati dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki aset berharga dalam keberagaman budaya, dalam kata lain harus menciptakan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang utuh.

Pemahaman yang utuh akan keberagaman yang ada di Indonesia sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Sebagai bagian dari negara, refleksi 71 tahun kemerdekaan Indonesia bangsa Indonesia belum sepenuhnya mencapai tujuan negara merdeka sebagaimana yang termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945. Dalam sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seluas-luasnya juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Kebebasan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan hakikat keberagaman dapat memecahbelah bangsa Indonesia.

Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat-istiadat antara satu etnis dengan etnis lain sebagai, antara satu agama dengan agama lain, sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta

menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu.

Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

Daftar Pustaka

- Budiono Kusumohamodjojo, 2000, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia*. Grasindo: Jakarta.
- Lestari, Puji. 2012. Tersedia Online pada:
http://fujilestariman1.blogspot.co.id/2012/09/bab-ii-budaya-demokrasi-menuju_26.html
- Price, Jason M.C. 2007. *Democracy: A Critical Red Ideal*. *Journal of Thought*, Spring Summer 2007.
- Rusdiana HA. 2014. *Pendidikan Multikultural, Suatu Upaya penguatan Jatidiri Bangsa, Konsep-Prinsip-Implementasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suparlan, Dadang. 2015. *Sejarah dan Prospek Demokrasi*. Jurnal Sosio Didaktika. UIN Jakarta.
- Sumantri, Endang. 2003. *Pendidikan Politik*. Jakarta: Universitas Te